



**LAPORAN KINERJA
BIRO
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
TAHUN 2021**

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021.

Laporan ini disusun sebagai implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dengan disusunnya LKjIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Biro Kesejahteraan Rakyat dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat. Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi salah satu upaya

perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat kedepannya.

Surabaya, Januari 2022

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



GATOT SOEBROTO, SE, M. PSDM

Pembina

NIP. 19750525 199903 1 010



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Stuktur Organisasi | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi | 2 |
| C. Isu - Isu Strategis | 5 |
| D. Cascading Kinerja | 8 |
| E. Peta Proses Bisnis | 13 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis (Renstra) | 16 |
| A.1. Tujuan dan Sasaran | 16 |
| A.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) | 18 |
| A.3. Program Biro Kesejahteraan Rakyat | 19 |
| B. Perjanjian Kinerja | 21 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat | 23 |
| A.1. Capaian Kinerja | |
| A.2. Capaian Kinerja dibandingkan tahun | |

| | |
|---|----|
| Sebelumnya | |
| A.3. Capaian Kinerja dibandingkan target pada Renstra | |
| A.4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja | |
| A.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | |
| A.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja | |
| B. Realisasi Anggaran | 48 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 51 |
| B. Saran | 52 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN



A. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya sehingga menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas tersebut, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahun 2020, Biro Kesejahteraan Rakyat masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :



B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Sedangkan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

C. ISU-ISU STRATEGIS

Untuk mewujudkan Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak, diperlukan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu perlu adanya pendayagunaan berbagai potensi Jawa Timur, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, berakhlak, dan beretika. Dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat akan berupaya maksimal untuk menghasilkan kebijakan dibidang Bina mental spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang mampu mendukung visi dan misi

Gubernur serta Wakil Gubernur Jawa Timur dalam RPJMD 2019-2024.

Sedangkan pada tahun 2021, menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2019 - 2024, maka isu strategis yang menjadi fokus dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. sepanjang tahun 2020 hubungan toleransi beragama sangat baik, dimana tidak terjadi konflik antar umat beragama maupun golongan. Meskipun sempat terjadi keresahan di masyarakat pada awal masa pandemic covid- 19, terkait protocol kesehatan di tempat peribadatan yang dianggap sebagian kelompok masyarakat tidak sesuai aturan Agama. Namun lonjakan kasus covid- 19 pada pertengahan Tahun 2021 menimbulkan keresahan baru di tahun 2021. Bahkan terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi di Jawa Timur yang menyentuh 975 kasus/ hari yang menimbulkan keresahan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan kegiatan keagamaan.

2. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pondok pesantren yang besar, yaitu 4.452 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 564.299 orang atau setara dengan 2,4% dari jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) Jawa Timur. Namun masih banyak pondok pesantren di Jawa Timur yang belum memberikan bekal yang utuh bagi santrinya. Kurangnya pendidikan formal di pondok pesantren dan pendidikan keterampilan vokasional yang diajarkan di pesantren, menyebabkan tamatan pondok pesantren memiliki ilmu yang terbatas pada ilmu agama saja.
3. Lonjakan kasus pandemic covid-19 yang terjadi di tahun 2021 di Jawa Timur sangat tinggi hingga menyentuh angka 1.604 korban meninggal dan rata-rata kasus baru 7 hari menyentuh angka 1.778. Sehingga diperlukan rumusan kebijakan yang bersifat komprehensif sebagai tindakan preventif untuk membantu menekan dampak ppanдеми covid 19..
4. Banyaknya huffadz yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren di Jawa Timur, tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang formal yang lebih tinggi, karena

faktor ekonomi, perbedaan kurikulum dan kurangnya pengetahuan formal. Sedangkan jika langsung dilepas pada kehidupan bermasyarakat, maka pilihan pekerjaan terbatas untuk menjadi Guru Madrasah atau Guru Ngaji, karena kurangnya modal dan ketrampilan dari santri dan santriwati.

5. Masih banyak Masjid di wilayah Jawa Timur yang belum sejahtera khususnya di wilayah terpencil, daerah miskin, kampung nelayan, daerah rawan aqidah, pegunungan dan kepulauan. Padahal Masjid memiliki potensi besar sebagai lembaga umat dan bertemunya jamaah dari berbagai latar belakang. Saat ini data masjid yang termasuk dalam kriteria tersebut belum ada. Namun dari koordinasi awal dengan Dewan Masjid Indonesia di beberapa Kabupaten di Jawa Timur sebagai sampling diperoleh informasi bahwa masjid yang termasuk kriteria di wilayah terpencil, daerah miskin, kampung nelayan, daerah rawan aqidah, pegunungan dan kepulauan berkisar 1,5% - 2 % dari jumlah masjid yang ada. Oleh karena itu Imam dan Pengurus Masjid di daerah yang sesuai kriteria tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari

Pemerintah sebagai upaya untuk mendukung kehidupan beragama yang lebih baik.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2021 sebesar 72,14 atau tumbuh 0,60 persen poin (meningkat 0,43 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. sesuai data dari Badan Pusat Statistik adalah 71,71. menduduki peringkat ke-15 Nasional dengan kategori IPM Tinggi. Untuk terus meningkatkannya dibutuhkan upaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka percepatan pencapaian IPM di Jawa Timur, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perlu adanya koordinator yang mensinergikan beberapa Perangkat Daerah dengan tugas-tugas tersebut untuk bisa menuntaskan masalah IPM di Jawa Timur. Dengan demikian Gubernur Jawa Timur bisa mengambil kebijakan melalui rumusan yang tepat, tidak saling tumpang tindih dan mencakup beberapa permasalahan sekaligus terkait IPM di Jawa Timur.
7. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 pengeluaran per kapita masyarakat Jawa Timur yang disesuaikan mencapai Rp 11.700.000,- per tahun naik sebesar

0,19 % dari tahun 2020. Namun bahan pangan mengalami kenaikan sebesar 2,29 % sebagai dampak pandemi Covid-19. Keadaan tidak berimbang ini tentu berdampak pada kondisi social ekonomi masyarakat Jawa Timur, dimana terjadi kesenjangan terutama dikalangan pekerja yang bahkan harus dirumahkan sebagai kebijakan perusahaan karena adanya pandemi. Dengan pola hidup new normal yang membatasi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat menjadi tantangan yang besar bagi Biro Kesejahteraan Rakyat untuk tetap membina mental spiritual masyarakat Jawa Timur dan turut memberikan stimulus- stimulus melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat.

Dengan berbagai permasalahan yang berkembang tersebut, maka strategi yang dilakukan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial antara lain :

- Meningkatkan keharmonisan sosial masyarakat Jawa Timur
- Meningkatkan potensi pondok pesantren di Jatim

- Meningkatkan kualitas tenaga pengajar lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Timur
- Berkomunikasi aktif dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan serta menyusun rumusan kebijakan tentang beribadah di era pandemi covid-19 dan era new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
- Bersinergi dengan Perangkat Daerah Mitra untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan pentingnya membangun ketahanan keluarga
- Bersinergi dengan Perangkat Daerah Mitra untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat karena adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur.

D. CASCADING KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai kekhasan kegiatan di bidang bina mental spiritual, karena program/kegiatan ini tidak diampu oleh Perangkat Daerah lain di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu Biro Kesejahteraan Rakyat juga ikut mendukung salah

Indikator Keberhasilan Daerah yaitu Indeks Kepedulian Sosial.

Cascading Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2021 mengalami perubahan, sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis pada Biro Kesejahteraan Rakyat 2019-2024. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat Perkembangan Kebijakan Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terjadi perubahan nomenklatur, struktur, tugas dan fungsi

3. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Adanya pandemi covid-19 yang menjadi bencana nasional dan merubah arah prioritas pembangunan daerah, sehingga berdampak pada Refocusing Anggaran serta Perubahan Kondisi Makro Ekonomi, maka perlu adanya penyesuaian Target Kinerja Pembangunan melalui Dokumen Perubahan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019-2024.

Berdasarkan perubahan tersebut maka cascading Biro Kesejahteraan Rakyat adalah, sebagai berikut :

Visi Gubernur & Wakil Gubernur

Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong

Misi ke-3

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

Tujuan

Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar

Sasaran

Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar



Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial (Tahun 2021)

Tujuan

Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama

Sasaran

1. Persentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti
2. Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Biro



| | |
|--|--|
| Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Program: Kesejahteraan Rakyat |
| Indikator: 1. Persentase indikator program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks profesionalis me ASN | Indikator: 1. Persentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual 2. Persentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar |

| | |
|---|--|
| | <p>3. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar</p> <p>4. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual</p> <p>5. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar</p> <p>6. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar</p> |
| <p><u>Kegiatan:</u> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Persentase indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat yang tercapai</p> | <p><u>Kegiatan:</u> Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual</p> <p>2. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang kelembagaan bina spiritual</p> <p>3. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang bina kehidupan spiritual</p> <p>4. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual</p> <p>5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual</p> <p>6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina kehidupan spiritual</p> <p>7. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual</p> <p>8. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang kelembagaan bina spiritual</p> <p>9. Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur</p> |
| <p><u>Kegiatan:</u> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Persentase realisasi anggaran biro Kesejahteraan Rakyat</p> | <p><u>Kegiatan:</u> Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan</p> <p>2. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan</p> <p>3. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang social</p> <p>4. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan</p> <p>5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesehatan</p> <p>6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang social</p> |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 7. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang pendidikan 8. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang social 9. Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang pendidikan 10. Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang social |
| <p><u>Kegiatan:</u> Pengelolaan administrasi keuangan</p> <p><u>Indikator</u> Jumlah dokumen</p> | <p><u>Kegiatan:</u> Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</p> <p><u>Indikator:</u></p> |
| <p><u>Kegiatan:</u> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p><u>Indikator</u> 1. Prosentase pegawai yang memenuhi waktu kerja efektif 75.000 menit sesuai tugas pokok dan fungsi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase fasilitas rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata 2. Prosentase fasilitas rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja 3. Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata 4. Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja 5. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata 6. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja 7. Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata 8. Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk |

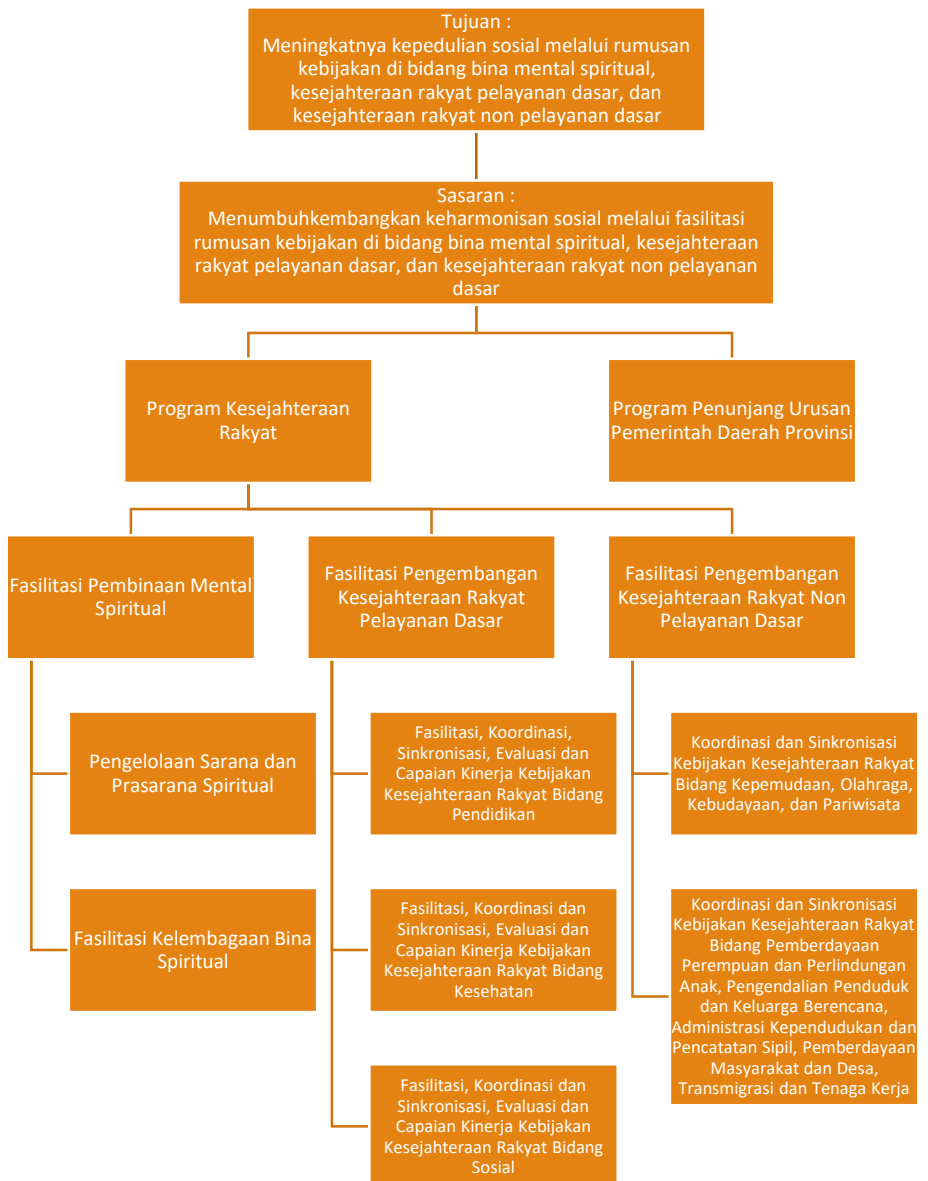
| | |
|--|--|
| | dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja |
| <u>Kegiatan:</u> Administrasi Umum Perangkat Daerah <u>Indikator</u> 1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum | |
| <u>Kegiatan:</u> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <u>Indikator</u> 1. jumlah paket pengadaan aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| <u>Kegiatan:</u> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <u>Indikator</u> 1. jumlah jasa yang menunjang pelayanan ketatausahaan | |
| <u>Kegiatan:</u> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <u>Indikator</u> 1. Jumlah jasa untuk pemeliharaan aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

Pada tahun 2021 terdapat perkembangan kebijakan nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu juga adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terjadi perubahan nomenklatur, struktur, tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah. Permendagri ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 yang mengubah nomenklatur, struktur dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2021.

Cascading kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dapat tergambarkan sebagai berikut :



**Tabel Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator
Biro Kesejahteraan Rakyat**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) |
|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | <p>Tujuan :</p> <p>Indeks Kepedulian Sosial</p> <p>Sasaran :</p> <p>1 Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti</p> <p>2 Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro</p> | <u>Program</u> : Kesejahteraan Rakyat | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual • Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar • Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar • Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual • Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar |
| | | | <p><u>Kegiatan :</u></p> <p>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang kelembagaan bina spiritual • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang bina kehidupan spiritual • Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual • Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina kehidupan spiritual |
| | | | <u>Sub Kegiatan :</u> Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data diolah di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan • Prosentase kebijakan yang dianalisa di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan • Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual yang ditindaklanjuti |
| | | | Fasilitasi Kelmbagaan Bina Spiriuat | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data yang diolah dibidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama • Prosentase kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur yang terlaksana • Prosentase data yang diolah dibidang lembaga bina spiritual • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang lembaga bina spiritual • Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah dibidang Kelembagaan bina spiritual yang ditindaklanjuti |
| | | <p><u>Kegiatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang social • Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan • Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesehatan |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang social |
| | | | <p><u>Sub Kegiatan :</u></p> <p>-Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</p> | <ul style="list-style-type: none"> Presentase data yang diolah dibidang pendidikan Presentase kebijakan yang dianalisa dibidang pendidikan Presentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang pendidikan yang terlaksana Presentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang pendidikan yang ditindaklanjuti |
| | | | <p><u>- Sub Kegiatan :</u></p> <p>Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</p> | <ul style="list-style-type: none"> Presentase data yang diolah dibidang kesehatan Presentase kebijakan yang dianalisa dibidang kesehatan |
| | | | <p><u>- Sub Kegiatan:</u></p> <p>Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</p> | <ul style="list-style-type: none"> Presentase data yang diolah dibidang sosial Presentase kebijakan yang dianalisa dibidang sosial Presentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang sosial yang terlaksana |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sosial yang ditindaklanjuti |
| | | | <p><u>kegiatan</u> : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja • Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata • Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja • Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>hibah dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja • Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata • Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja • Prosentase data yang diolah di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p><u>Sub Kegiatan :</u></p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang terlaksana • Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang ditindaklanjuti |
| | | | <p><u>Sub Kegiatan :</u></p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja • Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata • Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data yang diolah di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata • Prosentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang terlaksana • Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang ditindaklanjuti |
| | | | <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data yang diolah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga kerja • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |

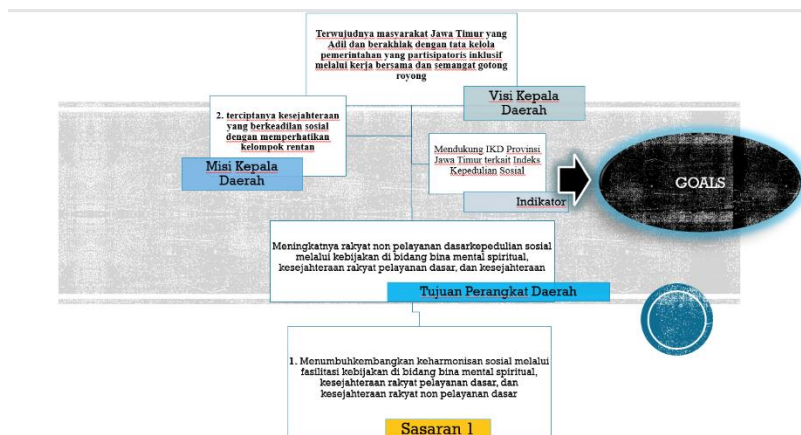
| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang terlaksana • Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang ditindaklanjuti |
| | | <p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Persentase indikator program yang tercapai • Persentase realisasi anggaran • Indeks profesionalisme ASN |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Persentase indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat yang tercapai |

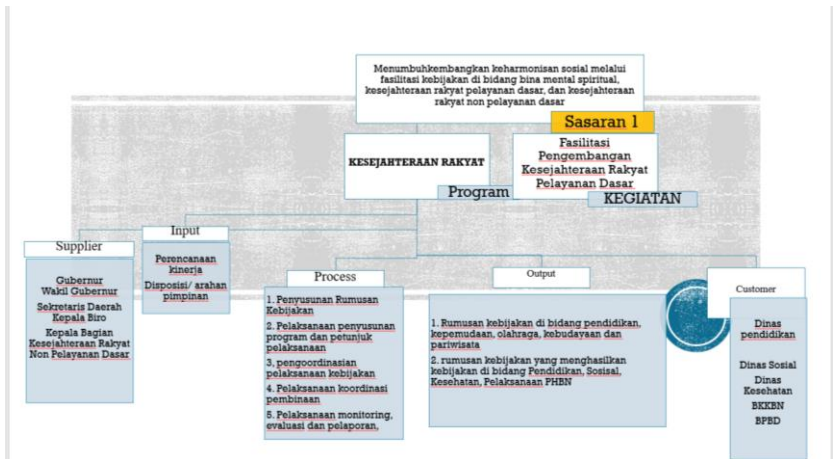
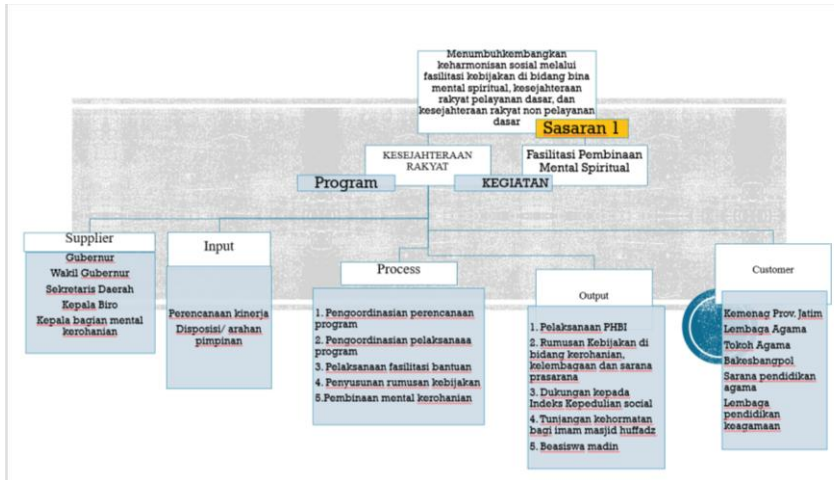
| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan: | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Perubahan | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA Perubahan | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan evaluasi kinerja | | |
| | | | <u>Kegiatan</u> : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran biro Kesejahteraan Rakyat |
| | | | <u>Sub Kegiatan</u> : | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan | |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |

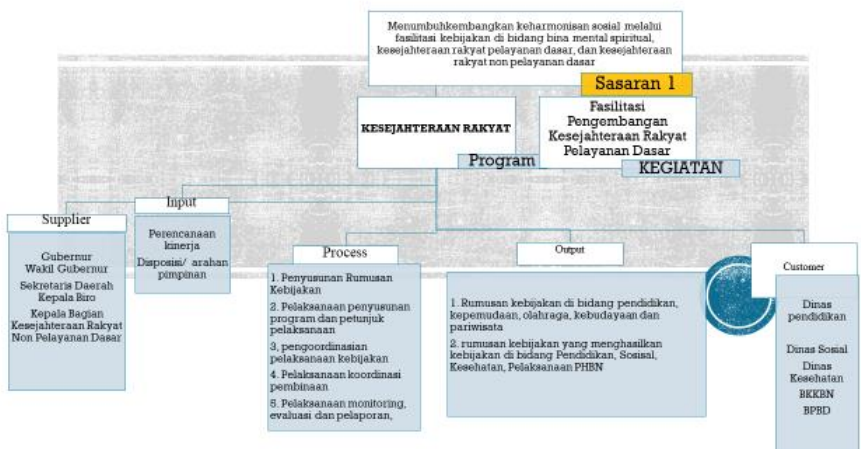
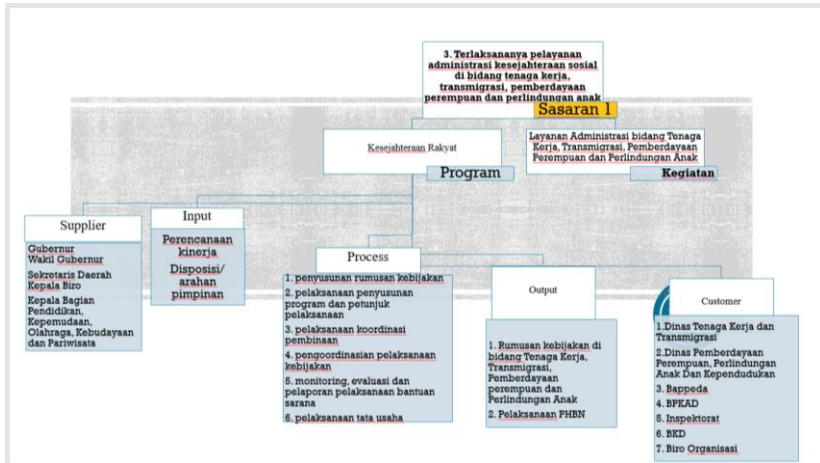
| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan verifikasi penatausahaan |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah laporan akuntansi Biro |
| | | | | |

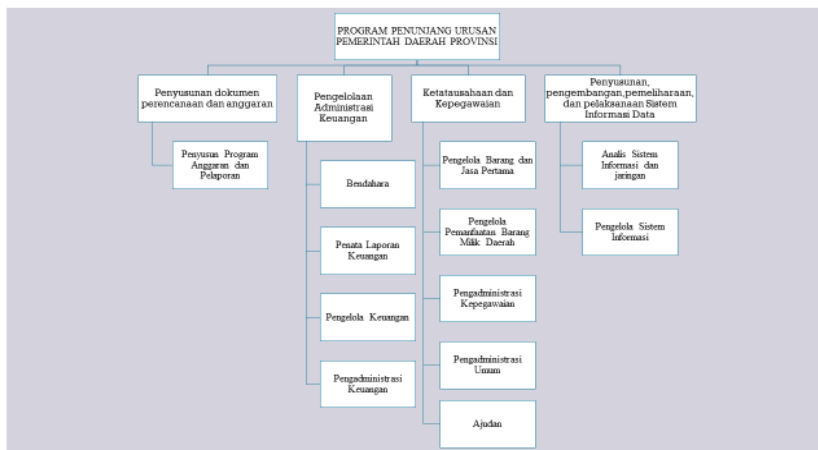
E. PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis yang mendasari kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2021 berdasar pada peta proses bisnis baru, dengan nomenklatur berdasar pada Pergub Nomor 48 Tahun 2020 dan hanya menitikberatkan pada strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Namun demikian peta proses bisnis ini masih memiliki banyak kekurangan, karena secara eksternal belum berdasarkan pada Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang seharusnya bisa menggambarkan dengan jelas posisi Biro dalam strategi pencapaian Sekretariat Daerah untuk menunjang visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur.









F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Dari hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 yang diselenggarakan oleh tim evaluator SAKIP, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan antara lain :

1. Biro Adm. Kesejahteraan Sosial telah menerapkan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja
2. Biro Adm. Kesejahteraan Sosial menyusun dokumen perencanaan dan telah menjabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja disemua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan

tercapainya tujuan, sasaran strategis dan hasil program

3. Mekanisme cascade kinerja sebaiknya berpedoman pada proses bisnis organisasi
4. Pelaksanaan reviu kinerja internal secara berkala belum optimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Meskipun Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur belum memiliki Rencana Strategis yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap Biro untuk menyusun Renstra masing-masing, sehingga Rencana Strategis yang dibuat oleh masing-masing Biro dalam Sekretariat Daerah bisa selaras dalam menunjang Visi dan Misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Dengan kondisi yang demikian terbatas, serta berdasar pada Reviu RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, Biro Kesejahteraan Rakyat menyusun Rencana Strategis Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial tahun 2019-2024 yang memuat tujuan organisasi yang ingin dicapai. Tujuan ini menjadi target yang ingin dicapai pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2021 terdapat perubahan nomenklatur, struktur dan fungsi yang tentu

juga merubah tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

A.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar

b. Sasaran

Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat pada dokumen Renstra 2019 - 2024 bisa ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel II.1
Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|--|--|---|
| Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitas kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti |
| | | Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Biro |

A.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Biro Kesejahteraan Rakyat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2020 menyesuaikan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2024. IKU ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Adapun indikator utama Biro

Kesejahteraan Rakyat yang menjadi acuan, ditampilkan sebagai berikut :

Tabel – II.2
Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Perhitungan |
|---|---|--|
| Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti 2. Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Biro | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti di Bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar 2. Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Biro |

A.3 Program Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

Strategi pencapaian tujuan, sasaran serta indikator kinerja utama Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2021 diimplementasikan melalui 2 program yang didukung 15 kegiatan meliputi :

❖ **Program Prioritas :**

1. Program Kesejahteraan Rakyat

❖ **Program Penunjang :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan, Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan kinerja tertentu berdasarkan Sumber Daya Organisasi yang dimiliki.

Sebagaimana perubahan Struktur Organisasi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang tertera pada perugub 48 Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021 sebagai Perangkat Daerah diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dengan Gubernur Jawa Timur, dilanjutkan dengan Perjanjian kinerja antara Pejabat

Administrator (Para Kepala Bagian) dengan Kepala Biro serta antara Pejabat Pengawas (para Kepala Sub Bagian) dengan Pejabat Administrator dan seluruh Staf dengan Pejabat Pengawas di masing-masing Bagian.

Berikut diuraikan perjanjian kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021 dalam rangka mencapai tujuan :

Tabel. II.3
Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1. | Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | 1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | 90 |
| | | 2. Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro | 82 |

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A.1 CAPAIAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2021, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Biro. Indikator yang digunakan merujuk pada tujuan Biro yang ingin dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian kinerja di Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pengukuran Kinerja yang ditetapkan atas dasar sasaran, indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase pencapaian sebagai berikut :

**Tabel III. 1.
Pencapaian Kinerja Biro Adm. Kesejahteraan Sosial**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2021 | REALISASI 2021 | CAPAIAN % |
|----|---|---|-------------|----------------|-----------|
| 1. | Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | 1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti 2. Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro | 90% | 90% | 100 |
| | | | 82 | 80,03 | 97,59 |

A.2 CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA

Dikarenakan terdapat peralihan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, tujuan, sasaran dan indikator capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka perbandingan capaian kinerja akan digambarkan melalui 2 tabel.

Tabel III.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2020 | CAPAIAN 2021 |
|-----------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Layanan Administrasi di bidang Mental Kerohanian | Persentase rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian yang ditindaklanjuti | 94,1 % | - |
| 2. | Layanan Administrasi di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata | Persentase rumusan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang ditindaklanjuti | 91,4 % | - |
| 3. | Layanan Administrasi di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak | Persentase rumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti | 94,1 % | - |
| 4. | Layanan Administrasi di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana | Persentase rumusan kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti | 91,4 % | - |
| 5. | Dukungan Layanan Administrasi Bantuan Hibah | Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti | 100,61 % | - |

Tabel III.2.1
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2020 | CAPAIAN 2021 |
|----|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Kesejahteraan Rakyat | 1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual 2. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 3. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar 4. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual 5. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan | - - - - - | 100 100 100 100 100 |

| | | | | |
|----|---|--|-------------|----------------------|
| | | rakyat pelayanan dasar 6. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | - | 100 |
| 2. | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 1. Persentase indikator program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks profesionalisme ASN | - - - | 91,84 96,48 83 |

Fluktuasi capaian yang terdapat pada kolom diatas dikarenakan adanya perubahan target pada program, meskipun indikatornya sama, sehingga menghasilkan prosentase capaian seperti diatas.

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DAN TARGET PADA REVIU RENSTRA 2019 - 2024

Dengan adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 untuk penanganan pandemi covid-19, maka Biro Kesejahteraan Rakyat menurunkan target capaian kinerja dari yang sebelumnya terdapat pada dokumen perencanaan strategis. Hal ini dikarenakan terbatasnya

anggaran untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan fasilitasi sehingga berpengaruh pada outcome yang dihasilkan Biro. Meskipun sebagian besar kegiatan dapat terselenggara secara daring, namun dengan keterbatasan sarana, kualitas dan kapasitas SDM, maka dilakukan juga rasionalisasi target kinerja.

Kemudian dengan adanya kebijakan nasional untuk perubahan nomenklatur dan struktur organisasi menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2021, maka disusunlah Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 yang memuat berbagai perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan masing-masing indikatornya. Dengan demikian target kinerja tahun 2021 hingga 2024 menyesuaikan dengan dokumen perubahan Renstra dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menyebabkan Realisasi di tahun 2020 tidak dapat disandingkan dengan realisasi 2021 dikarenakan

perbedaan target kinerja dan perubahan struktur. Target dan capaian 2021 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.3
Indikator, Target dan Realisasi Kinerja pada Renstra 2019 - 2024

| Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi | Target renstra tahun ke- | | Realisasi capaian tahun ke- | |
|--|--------------------------|------|-----------------------------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual | - | 83 | - | 100 |
| 2. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang kelembagaan bina spiritual | - | 83 | - | 100 |
| 3. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang bina kehidupan spiritual | - | 83 | - | 100 |
| 4. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual | - | 2 | - | 2 |
| 5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual | - | 2 | - | 2 |
| 6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina kehidupan spiritual | - | 2 | - | 2 |
| 7. Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual yang ditindaklanjuti | - | 90 | - | 94,32 |
| 1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan | - | 83 | - | 100 |
| 2. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan | - | 83 | - | 100 |
| 3. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang social | - | 83 | - | 100 |
| 4. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan | - | 2 | - | 2 |
| 5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesehatan | - | 2 | - | 2 |
| 6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang social | - | 2 | - | 2 |
| 7. Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sosial yang ditindaklanjuti | - | 90 | - | 98,06 |

| Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi | Target renstra tahun ke- | | Realisasi capaian tahun ke- | |
|---|--------------------------|------|-----------------------------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 8. Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan sosial di bidang sosial yang ditindaklanjuti | - | 90 | - | 98,93 |
| 9. Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang pendidikan yang ditindaklanjuti | - | 90 | - | 98,01 |
| 1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata | - | 87 | - | 100 |
| 2. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja | - | 87 | - | 100 |
| 3. Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata | - | 2 | 2 | 2 |
| 4. Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja | - | 2 | 2 | 2 |
| 5. Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang ditindaklanjuti | - | 90 | - | 96,11 |
| 1. Persentase indikator program yang tercapai | - | 80 | - | 91,84 |
| 2. Persentase realisasi anggaran | - | 95 | - | 96,48 |
| 3. Indeks profesionalis me ASN | - | 80 | - | 83 |

Tabel III.4
Indikator, Target dan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra
2019 – 2024

| No | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi | Target renstra tahun ke- | | | |
|----|---|--------------------------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | 85 % | 87 % | 90 % | 92 % |
| 2. | <u>Program :</u> 1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | 85 % | 87 % | 90 % | 92 % |
| | 2. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | 27 | 30 | 33 | 36 |

A.4 ANALISIS PENYEBAB KENAIKAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 diperlukan pendekatan yang berbeda, karena terdapat perubahan indikator sasaran menyesuaikan pada dokumen Reviu

Renstra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 – 2024.

Dalam Tabel III.2 dapat dilihat capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tidak dapat disandingkan jika dibandingkan dengan tahun lalu, dikarenakan ditahun 2020 dan 2021 sudah menggunakan pendekatan indikator program yang sangat berbeda. Yang dapat dilihat pada tabel III.2 Capaian 2020 dan 2021 mengalami perubahan yang sangat signifikan yang sebelumnya 5 Program di tahun 2020 menjadi 2 program saja di tahun 2021.

Perubahan Capaian kinerja tersebut terkait dengan perubahan program indikator dan target di tahun 2021 yang menyesuaikan dengan dokumen Reviu Renstra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 – 2024. Selain itu dengan adanya refocusing anggaran, maka perlu merasionalkan target dengan terbatasnya sumber daya anggaran, dan kapasitas SDM.

Kenaikan capaian kinerja di tahun 2021 meskipun ditengah pandemi covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa dianalisa sebagai berikut :

| | | | |
|----------|----------|---------------|--------|
| Strenght | Weakness | Opportunities | Threat |
|----------|----------|---------------|--------|

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>a. Jumlah SDM yang cukup banyak</p> <p>b. Peran biro yang strategis sebagai fasilitator dan coordinator Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan terkait</p> <p>c. Adanya kesempatan untuk merasionalkan target setelah refocusing anggaran</p> | <p>a. Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan kurang maksimal hingga Bulan Mei</p> <p>b. Jadwal survei lembaga calon penerima bantuan hibah yang diundur karena pandemi membuat kegiatan menumpuk diakhir tahun</p> <p>c. Anggaran terbatas setelah refocusing</p> | <p>a. Banyaknya Perangkat daerah yang menjadi mitra bisa memberikan masukan data dan bekerjasama dalam perumusan kebijakan</p> | <p>a. Belum adanya dokumen perencanaan di Sekretariat Daerah yang seharusnya menjadi dasar bagi masing-masing Biro untuk menyusun dokumen perencanaan</p> |
|--|--|--|---|

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dengan memasang faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Strength – Opportunity

Fokus pada kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.

- a. Bekerjasama dengan Perangkat Daerah mitra dengan mengoptimalkan jumlah SDM yang banyak secara bergantian. Meskipun dilakukan secara daring, namun masing-masing staf

memiliki pengalaman untuk berkoordinasi dan “sharing knowledge” dengan PD mitra.

- b. Setiap staf terlibat aktif dalam rapat koordinasi perumusan kebijakan dengan fokus pada tugasnya pada jabatan fungsional umum pengolah data atau analis.
- c. Berkoordinasi dengan Bappeda terkait rasionalisasi target capaian kinerja serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra untuk mempertimbangkan sub kegiatan yang masih dapat terlaksana dengan adanya pandemi dan refocusing anggaran, serta berdasar pada arahan Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. Weakness – Opportunity

Menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal

- a. Melalui pertemuan daring dan pertemuan luring dengan protokol kesehatan yang ketat, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial berupaya untuk tetap menghasilkan kinerja melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra.
- b. Fokus untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra selama masa

awal pandemi dalam perumusan kebijakan, sebelum adanya arahan Gubernur untuk survei lembaga calon penerima bantuan hibah

- c. Memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan kinerja.

3. Strength – Threats

Menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal

- a. Meskipun adanya WFH (Work From Home) di tahun 2021, masing-masing staf tetap melaksanakan kinerja yang telah direncanakan dan diterjemahkan kedalam perjanjian kinerja. WFH yang dijalankan harus tetap efektif dan menghasilkan kinerja. Untuk itu setiap individu diharapkan profesional dalam pekerjaannya, mengerti target kinerjanya setiap bulan dan berupaya untuk memenuhi target tersebut.

Dengan perencanaan kinerja yang baik, staf mempunyai kemampuan untuk menghitung Waktu Kerja Efektif yang dimiliki, sehingga dapat memperhitungkan waktu yang tersisa dan target yang belum terselesaikan, termasuk dengan memperhitungkan beban tugas tambahan.

Dengan demikian jumlah SDM yang besar bisa memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran Biro.

- b. Perlu adanya upaya untuk menyusun dokumen perencanaan ditingkat Sekretariat Daerah, dengan memperhatikan tugas dan fungsi keberadaan Sekretariat Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

4. Weakness – Threats

Memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal

- a. Dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada semua sektor pemerintahan, memberikan kesempatan kepada Biro sebagai unsur fasilitator dan koordinator untuk menggandeng Perangkat Daerah yang menjadi mitra agar dapat bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan karena covid-19. Upaya penyelesaian permasalahan yang kompleks dan lintas sektor menjadi tanggung jawab Biro agar dapat terus eksis dimasa pandemi.

- b. Adanya WFH dan tugas tambahan yang besar terkait Peringatan Hari Besar Nasional dan dukungan layanan administrasi bantuan hibah tidak menjadi alasan untuk tidak hadir pada rapat terkait tupoksi. Dengan adanya pemanfaatan IT melalui zoom meeting, Whatsapp group, live Instagram dan live youtube menjadi sarana untuk bisa tetap eksis dan berkinerja dalam perumusan kebijakan.

A.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Biro Kesejahteraan Sosial dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana serta anggaran di Biro. Terkait sumber daya anggaran, Dokumen penganggaran di tahun 2020 berubah tiga kali dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.

Untuk mengetahui persentase anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada masing-masing sasaran strategis jika dibandingkan

dengan keseluruhan anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.5
Alokasi per Sasaran Strategis

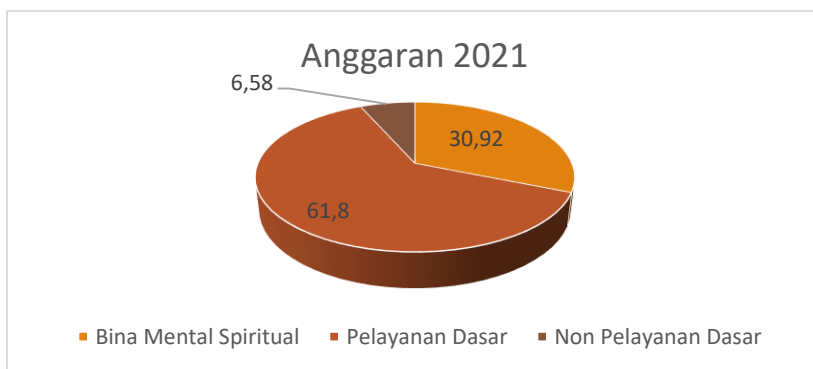
| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN (Rp) | % ANGGARAN |
|----|---|---|-------------------|------------|
| 1. | Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | <ul style="list-style-type: none"> Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | 1.308.075.318.700 | 91,84 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Nilai Evaluasi Implementasi Sakip | 32.781.580.000 | 96,58 |

Berdasarkan tabel tersebut, faktor dukungan anggaran pada sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat di Tahun 2021 adalah untuk Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang dalam pelaksanaannya anggaran tersebut melekat pada masing-masing bagian dan jumlahnya sangat bervariasi. Di tahun 2020 sebagian besar terdapat pada kebijakan di bidang Bina Mental Spiritual. Hal

tersebut dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah lain di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan bina mental Spiritual selain Biro Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dapat hadir untuk memberikan ketenangan spiritual di masyarakat melalui berbagai kebijakan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan Namun di tahun 2021 fokus anggaran beralih lebih fokus terhadap fasilitasi pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

Sehingga fokus anggaran yang terbatas dioptimalkan di sasaran tersebut agar selama masa pandemi.

Faktor dukungan anggaran pada masing-masing sasaran yang diampu oleh setiap bagian dapat digambarkan dari diagram berikut :



Pemanfaatan sumber daya anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi anggaran yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel III.6

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|----|---|--|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian |
| 1 | Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | <ul style="list-style-type: none"> Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti Nilai Evaluasi Implementasi Sakip | 9 | 90% | 100 | 1.308.075.318.700 | 1.291.483.295.774 | 96,58 |
| | | | 82 | 80,3 | 97,59 | 28.711.866.423 | 26.369.495.353 | 91,84 |

A.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

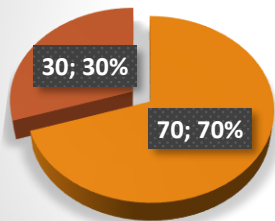
Capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat selama tahun 2020 sebagaimana tergambar dalam Tabel III.1 berhasil diraih karena adanya kinerja dari masing-masing bagian untuk menghasilkan rekomendasi dan rumusan kebijakan sebagai hasil dari koordinasi dengan PD mitra yang terkait dengan tupoksi Biro Kesejahteraan Rakyat. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dapat digambarkan sebagai berikut :

| Tujuan Biro : Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | | |
|---|---------|-------------------|
| Indikator sasaran | Capaian | Mendukung Sasaran |
| <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | 100 % | 70 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi Implementasi Sakip | 100 % | 30 % |
| Capaian Sasaran Tahun 2020 | | 100 % |

Pencapaian sasaran secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 93,74%

Dari tabel tersebut, dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut :

Dukungan Terhadap Pencapaian Sasaran



- Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti
- Nilai Evaluasi Implementasi Sakip

Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing bagian berkontribusi pada pencapaian sasaran Biro dengan jumlah yang hampir sama besar. Meskipun terdapat perbedaan capaian pada masing-masing bagian, namun semuanya telah bersinergi dan bekerjasama untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan Rakyat.

Dari berbagai tabel dan analisa yang telah disampaikan mengenai capaian kinerja tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah bisa dipertanggungjawabkan, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seperti :

1. Adanya pandemi covid-19 membawa dampak bagi pegawai untuk mengubah cara kerja dan kebiasaan dengan menerapkan new normal dan protokol kesehatan yang ketat di kantor. Adanya WFH membuat setiap pegawai secara profesional harus bisa menghitung secara mandiri target dan waktu pencapaian kinerja, serta menyimpan bukti kerja masing-masing. Pandemi juga membawa perubahan dalam penganggaran dengan adanya refocusing

anggaran untuk penanganan covid-19. Dengan adanya refocusing, maka Biro melaksanakan rasionalisasi target kinerja dengan terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana.

2. Tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan seperti dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan Peringatan Hari Besar Nasional belum dapat diakomodir pada Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2019.
3. Belum adanya dokumen perencanaan dilevel Sekretariat Daerah yang menjadi acuan untuk menyusun dokumen perencanaan dilevel Biro, sehingga selaras antara tujuan dan sasarannya dalam rangka mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.
4. Kurangnya koordinasi antar instansi di Kabupaten/Kota, sehingga seringkali berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang kurang maksimal di daerah.
5. Hasil rapat koordinasi belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara langsung, mengingat ada pembagian kewenangan dan urusan antara

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Namun beberapa kondisi tersebut tidak membuat kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat memburuk, namun sebagai pendorong untuk lebih baik lagi dalam mencapai target kinerja kedepannya. Jika melihat bahwa hampir semua indikator di Biro Kesejahteraan Rakyat mengalami peningkatan dalam perubahan, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi tidak menghambat Biro untuk terus berkinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan anggaran pada tahun 2020 untuk setiap program telah dilakukan sebaik mungkin oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, dengan penyerapan anggaran mengalami peningkatan dari yang sebelumnya **95,74 % menjadi 96,48% di tahun 2021**. Realisasi anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.7
Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat

| No | Program / Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----|---|----------------------|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 28.711.866.423,00 | 26.369.495.353,00 | 91,84 |
| 2 | Program Kesejahteraan Rakyat | 1.337.256.930.577,00 | 1.291.483.295.774,00 | 96,58 |
| | <i>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</i> | 413.594.970.300,00 | 390.343.411.276,00 | 94,38 |
| | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</i> | 826.538.235.100,00 | 810.064.513.484,00 | 98,01 |
| | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</i> | 97.123.725.177,00 | 91.075.371.990,00 | 93,77 |

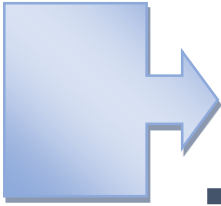
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Biro Kesejahteraan Rakyat, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP, antara lain :

1. Menerapkan budaya kerja Gus Kesra untuk menyusun indikator kinerja yang sesuai dan menghitung waktu kerja efektif yang rasional, serta capaian kinerja masing-masing staf.
2. Bekerjasama dengan perangkat daerah mitra untuk mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan

agar bisa menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat integratif.

3. Pemanfaatan evaluasi kinerja triwulan untuk menghitung capaian kinerja staf menyesuaikan dengan target bulanan dan tahunan
4. Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mensupport kinerja pegawai



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM Aparatur, dan pelaksanaan kebijakan merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2020 yang telah ditampilkan pada BAB III, maka dapat dilihat capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2021 sudah sesuai target meskipun tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan program yang sebelumnya 5 Program di tahun 2020 menjadi 2 program di tahun 2021, meskipun tidak dapat dibandingkan kinerja program 2020

dan Tahun 2021. Namun apabila dilihat dari nilai global kinerja anggaran meningkat 0,74 % dari 95,74 % menjadi 96,48% di tahun 2021, meskipun ditengah pandemi covid-19.

B. SARAN

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk terus meningkatkan kinerja adalah adalah :

- a) Pengembangan kebijakan nasional terkait kodefikasi dan nomenklatur, menjadi salah satu kesempatan untuk penataan kelembagaan dengan tugas dan fungsi yang lebih jelas, tidak tumpang tindih dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra dan juga bisa mengakomodir semua tugas-tugas yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat.
- b) Penyempurnaan mekanisme dan meningkatkan pelayanan administrasi baik tingkat kualitas maupun kuantitas dengan menyusun Standar Operasional Prosedur yang jelas, sesuai dengan proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut perlu dilakukan dengan

melihat pada proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengenali posisi Biro dan hubungannya dengan Perangkat Daerah lain, dimana Biro merupakan unsur staf di Sekretariat Daerah yang menunjang kinerja Sekretaris Daerah dan menjadi second opinion Gubernur dan berbeda dengan Dinas yang merupakan front liner unsur Pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak pelaksanaan rumusan kebijakan.

- c) Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif, agar dapat mengoptimalkan kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
- d) Sangat diperlukan saran dari stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat ;
- e) Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis.

Demikian Laporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Biro yang akuntabel. Semoga Laporan ini bisa menjadi salah satu upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat kedepannya.

Surabaya, Januari 2022
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



GATOT SOEBROTO, SE, M. PSDM

Pembina

NIP. 19750525 199903 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. HUDIYONO, M.Si**

Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya,

2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR




KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT**


Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 1 | Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | 85 % |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|--------------------------------|------------|
| 1 Program Kesejahteraan Rakyat | Rp 1.308.075.318.700,00 | APBD |
| 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp 32.781.580.000,00 | APBD |
| Jumlah | Rp 1.340.856.898.700,00 | |


Surabaya, 2021

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DONI NUGROHO SUSANTO, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. HUDIYONO, M.Si**

Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Timur

selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya,

2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010

Pihak Pertama
**KEPALA BAGIAN BINA MENTAL
SPIRITUAL**

DONI NUGROHO SUSANTO, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19730109 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatkan fasilitasi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat | 1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang bina mental spiritual 2. Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina mental spiritual | 87% 6 |

KEGIATAN

1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual

ANGGARAN

: Rp 347.002.469.546,00

Jumlah seluruhnya : Rp 347.002.469.546,00

Surabaya, Februari 2021

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



Dr. HUDIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640323 198503 1 010

KEPALA BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL



DONI NUGROHO SUSANTO, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19730109 199803 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WITJAKSONO KURNIAWAN, S.H, M.Si**

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. HUDIYONO, M.Si**

Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya,

2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010

Pihak Pertama
**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT PELAYANAN DASAR**

WITJAKSONO KURNIAWAN, S.H, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19701110 199803 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatkan fasilitasi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat | 1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 2. Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar | 87% 6 |

| KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|--------------------------------|
| 1. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | : Rp 891.146.590.595,00 |
| Jumlah seluruhnya | <u>: Rp 891.146.590.595,00</u> |

Surabaya, Februari 2021

**KEPALA BIRO
KESEJAHTERAAN RAKYAT**



Dr. HUDIYONO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640323 198503 1 010

**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PELAYANAN DASAR**



WITJAKSONO KURNIAWAN, S.H, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19701110 199803 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. MUHIBBIN, SH, M.Si**

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. HUDIYONO, M.Si**

Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya,

2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010

Pihak Pertama
**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT NON PELAYANAN DASAR**

Drs. MUHIBBIN, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681010 198611 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatkan fasilitasi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat | 1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | 87% |
| 2. | Meningkatkan pelaksanaan Penunjang Pemerintahan Provinsi | 2. Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | 4 |
| | | Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro | A |

| <u>KEGIATAN</u> | <u>ANGGARAN</u> |
|---|------------------------------|
| 1. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar : Rp | 69.926.258.559,00 |
| 2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Rp | 104.633.000,00 |
| 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Rp | 18.356.006.000,00 |
| 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Rp | 379.712.700,00 |
| 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah : Rp | 779.087.176,00 |
| 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp | 12.873.076.543,00 |
| 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp | 289.064.581,00 |
| Jumlah seluruhnya : | Rp 102.707.838.559,00 |

Surabaya, Februari 2021

**KEPALA BIRO
KESEJAHTERAAN RAKYAT**



Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010

**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON
PELAYANAN DASAR**



Drs. MUHIBBIN, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681010 198611 1 001

REKAPITULASI DATA

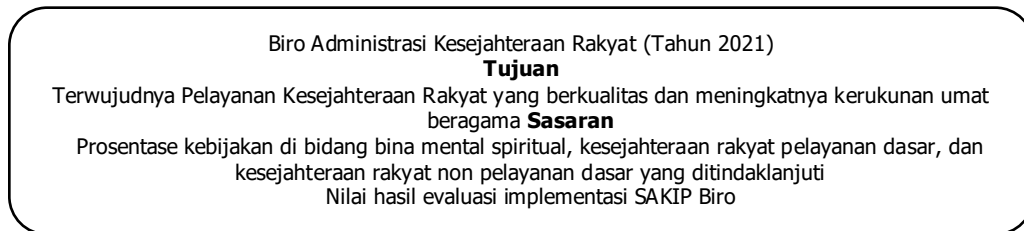
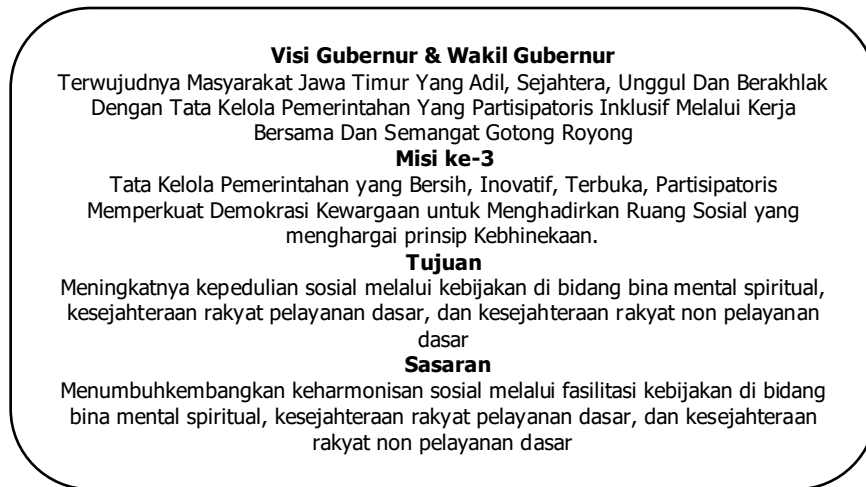
Pencapaian Kinerja Biro Adm. Kesejahteraan Sosial

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2021 | REALISASI 2021 | CAPAIAN % |
|----|---|--|-------------|----------------|-----------|
| 1. | Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | 1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | 90% | 90% | 100 |
| | | 2. Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro | 80 | 80,03 | 100 |

Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2021

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN (Rp) | % ANGGARAN |
|----|---|---|-------------------|------------|
| 1. | Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | • Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | 1.308.075.318.700 | 91,84 |
| | | • Nilai Evaluasi Implementasi Sakip | 32.781.580.000 | 96,58 |

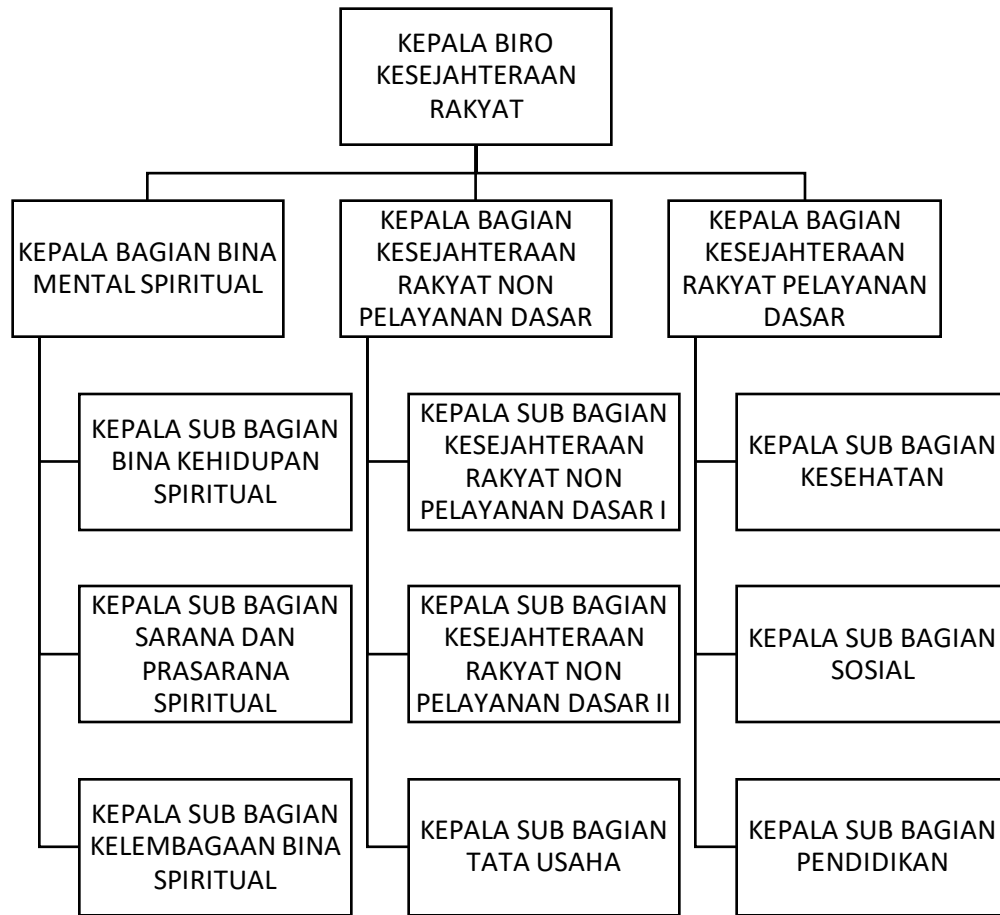
Keterkaitan RPJMD dengan Biro Kesejahteraan Rakyat



Data Pegawai berdasarkan Kompetensi sesuai dengan Diklat yang diikuti

| No | Jenis Diklat | Jumlah Pegawai yang mengikuti | Ket |
|----|------------------------|-------------------------------|-----|
| 1 | Diklat Pim II | - | |
| 2 | Diklat Pim III | 5 | |
| 3 | Diklat Pim IV | 10 | |
| 4 | 41 Jenis Diklat Teknis | 14 | |

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



Tabel 2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan

| NO | GOL | J A B A T A N | | | | JUMLAH | KET |
|----|---------------|---------------|--------|--------|------|------------|-----|
| | | ESELON | ESELON | ESELON | STAF | | |
| | | II | III | IV | | | |
| 1. | IV | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | |
| 2. | III | - | - | 6 | 41 | 47 | |
| 3. | II | - | - | - | 32 | 32 | |
| 4. | I | - | - | - | 9 | 9 | |
| 5. | PTT-PK | - | - | - | 34 | 34 | |
| | JUMLAH | | | | | 137 | |

Data Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Jabatan

| NO | PENDIDIKAN | J A B A T A N | | | | JUMLAH | KET |
|----|---------------|---------------|------------|-----------|------|------------|-----|
| | | ESELON II | ESELON III | ESELON IV | STAF | | |
| 1. | S-3 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 2. | S-2 | - | 3 | 9 | 16 | 28 | |
| 3. | S-1 / D-4 | - | - | 2 | 44 | 46 | |
| 5. | SM / D-3 | - | - | - | - | 0 | |
| 6. | D-2 / D-1 | - | - | - | - | 0 | |
| 7. | SLTA | - | - | - | 26 | 26 | |
| 8. | SLTP | - | - | - | - | 0 | |
| 9. | SD | - | - | - | 2 | 2 | |
| | JUMLAH | | | | | 103 | |

Sarana dan Prasarana Biro Kesejahteraan Rakyat

| No | Nama Barang | Jumlah | Satuan |
|-----|--|--------|----------|
| 1. | Alat-alat besar | 31 | Buah/set |
| 2. | Alat angkutan darat bermotor | 29 | Buah |
| 3. | Alat bengkel dan alat ukur | 10 | Buah |
| 4. | Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan | | Buah |
| 5. | Alat kantor dan rumah tangga | 8.026 | Buah |
| 6. | Meja dan kursi kerja/rapat pejabat | | Buah |
| 7. | Alat studio dan komunikasi | 296 | Buah |
| 8. | Bangunan gedung | 9 | Buah |
| 9. | Buku dan perpustakaan | 9.897 | Buah/set |
| 10. | Barang bercorak kebudayaan | 41 | Buah/set |

TABEL 6.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021- 2024
TABEL 6.3 T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro Kesejahteraan Rakyat

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (kondisi awal 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--|--|--|---------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|-------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp (ribuan) | Target | Rp (ribuan) | Target | Rp (ribuan) | target | Rp (ribuan) | target | Rp (ribuan) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | 20 | 21 |
| Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | Menumbuhkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | Tujuan : Indeks Kepedulian Sosial Sasaran : Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti 2 Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro | 4.01.04 | Program : Kesejahteraan Rakyat | 1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual | | 76,98 | | | | | | | | | | Biro Kesejahteraan Rakyat | Jtm |
| | | | | | | | 87 | 1.308.075.318.700 | 88 | 2.000.247.369.791 | 89 | 2.001.386.310.216 | 90 | 2.001.877.571.333 | | | | |
| | | | | | | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|----|---------------------|----|-----------------|----|---------------------|----|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | 2. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | | | | |
| | | | | | 3. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | 80 | | 82 | | 83 | | 85 | | | | | |
| | | | | | 4. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual | 80 | | 82 | | 83 | | 85 | | | | | |
| | | | | | 5. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar | 80 | | 82 | | 83 | | 85 | | | | | |
| | | | | | 6. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar | 80 | | 82 | | 83 | | 85 | | | | | |
| | | 4.01. 04.1. 01 | | Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | 1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan | 87 | 347.002.46 9.546 | 88 | 505.490.875.683 | 90 | 505.899.191. 542 | 92 | 506.075.311. 118 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|--|----|--|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang kelembagaan bina spiritual | 87 | | 88 | | 90 | | | 92 | | | | | | |
| | | | | | 3. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang bina kehidupan spiritual | 87 | | 88 | | 90 | | | 92 | | | | | | |
| | | | | | 4. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual | 2 | | 2 | | 3 | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | 5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual | 2 | | 2 | | 3 | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | 6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina kehidupan spiritual | 2 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | 7. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap | 85 | | 87 | | 89 | | | 90 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|---|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang kelembagaan bina spiritual | 85 | | 87 | | 89 | | 90 | | | | | | | |
| | | | | 9. Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur | 85 | | 87 | | 89 | | 90 | | | | | | | |
| | | 4.01.04.1.01.01 | Sub Kegiatan : - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data diolah di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan • Prosentase kebijakan yang dianalisa di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan • Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sarana prasarana | 90 | 331.932.435.143 | 92 | 244.486.871.677 | 94 | 244.525.858.167 | 96 | 244.542.674.276 | | | | | | |
| | | | | | 90 | | 92 | | 94 | | 96 | | | | | | | |
| | | | | | 93 | | 95 | | 96 | | 97 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|---|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 4.01.04.1.01.02 | - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | spiritual yang ditindaklanjuti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data yang diolah dibidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama • Prosentase kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur yang terlaksana • Prosentase data yang diolah dibidang lembaga bina spiritual • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang lembaga bina spiritual • Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah dibidang Kelembagaan bina spiritual yang ditindaklanjuti | 90 | 15.070.034.403 | 92 | 261.004.004.006 | 94 | 261.373.333.375 | 96 | 261.532.636.842 | | | | | | |
| | | | | | | 90 | | 92 | | 94 | | 96 | | | | | | | |
| | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | | | | | | 90 | | 92 | | 94 | | 96 | | | | | | | |
| | | | | | | 90 | | 92 | | 94 | | 96 | | | | | | | |
| | | | | | | 93 | | 95 | | 96 | | 97 | | | | | | | |
| | | | 4.01.04.1.02 | Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan | 87 | 891.146.590.595 | 88 | 502.467.610.373 | 90 | 502.755.461.211 | 92 | 502.879.620.246 | | | | | | |
| | | | | | 2. Prosentase fasilitasi | 87 | | 88 | | 90 | | 92 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|----|--|----|--|----|--|----|--|--|--|--|--|
| | | | rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan | | 87 | | 88 | | 90 | | 92 | | | | | |
| | | 4.01.04.1.02.01 | 3. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang social | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | 4.01.04.1.02.01 | 4. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | 4.01.04.1.02.01 | 5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesehatan | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | 4.01.04.1.02.02 | 6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang social | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | | | |
| | | 4.01.04.1.02.02 | 7. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang pendidikan | | 85 | | 87 | | 89 | | 90 | | | | | |
| | | 4.01.04.1.02.02 | 8. Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang social | | 85 | | 87 | | 89 | | 90 | | | | | |
| | | 4.01.04.1.02.02 | 9. Indeks kepuasan | | 85 | | 87 | | 89 | | 90 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|---|--|-----|-----------------|-----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 4.01. 04.1. 02. 03 | Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10. Ind eks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang social | | 85 | | 87 | | | 89 | | 90 | | | | | | |
| | | | | <u>Sub Kegiatan :</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data yang diolah dibidang pendidikan • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang pendidikan • Prosentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang pendidikan yang terlaksana • Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang pendidikan yang ditindaklanjuti | 90 | 756.511.420.007 | 92 | 252.018.598.387 | 94 | 252.208.219.517 | 96 | 252.290.009.122 | | | | | | |
| | | | | | | 90 | | 92 | | | 94 | | 96 | | | | | | |
| | | | | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | | |
| | | | | | | 93 | | 95 | | | 96 | | 97 | | | | | | |
| | | | | <u>Sub Kegiatan :</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data yang diolah dibidang kesehatan • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang kesehatan | 90 | 709.431.747 | 92 | 1.111.583.983 | 94 | 1.133.815.678 | 96 | 1.143.404.913 | | | | | | |
| | | | | | | 90 | | 92 | | | 94 | | 96 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---|---|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | Sub Kegiatan: Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data yang diolah dibidang sosial • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang sosial • Prosentase kegiatan peringatan Hari Besar Nasional di bidang sosial yang terlaksana • Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sosial yang ditindaklanjuti | 90 | 133.925.738.841 | 92 | 249.337.428.367 | 94 | 249.413.426.016 | 96 | 249.446.206.211 | | | | |
| | | | | | | 90 | | 92 | | 94 | | 96 | | | | | |
| | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | 93 | | 95 | | 96 | | 97 | | | | | |
| | | | 4.0 1.0 4.1 .03 | kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata 2. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja | 87 | 69.926.258.559 | 88 | 992.288.883.371 | 90 | 992.731.657.463 | 92 | 992.922.639.969 | | | | |
| | | | 4.0 1.0 | | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | | | | |
| | | | | | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja | | 85 | | 87 | | 89 | | 90 | | | | | |
| | | | | 7. Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata | | 85 | | 87 | | 87 | | 90 | | | | | |
| | | | | 8. Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Sub Kegiatan :</u> • Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan | • Prosentase data yang diolah di bidang Kepemudaan, Olahraga, | 90 | 56.295.305.890 | 92 | 492.510.746.706 | 94 | 492.659.459.801 | 96 | 492.723.604.475 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------|-----|-----------------|--|-----|-----------------|-----|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | n Rakyat Bidang Kepemudaan , Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Kebudayaan, dan Pariwisata | | 90 | | 92 | | | 94 | | 96 | | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata • Prosentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang terlaksana • Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang ditindaklanjuti | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | | 93 | | 95 | | | 94 | | 96 | | | | | |
| | | | | • Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan | • Prosentase data yang diolah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga kerja | | 90 | 13.630.952.669 | 92 | 499.778.136.665 | | 94 | 500.072.197.662 | 96 | 500.199.035.494 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja ▶ Prosentase kegiatan peringatan Hari Besar Nasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang terlaksana ▶ Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian | 90 | | 92 | | 94 | | 96 | | | | | |
| | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | 93 | | 95 | | 96 | | 97 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|---|--|----|--------------------|----|----------------|----|--------------------|----|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang ditindaklanjuti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.0 .03 .01 | Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI | <ul style="list-style-type: none"> Persentase indikator program yang tercapai Persentase realisasi anggaran Indeks profesionalisme ASN | | 80 | 20.728.690 .766 | 82 | 23.687.423.893 | 85 | 24.105.228.4 66 | 87 | 24.222.346.4 87 | | | | | |
| | | XX X0 11 01 | Kegiatan : • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Persentase indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat yang tercapai | | 80 | 104.633.000 | 82 | 103.573.000 | 85 | 105.756.879 | 87 | 106.651.317 | | | | | |
| | | XX X01 101 01 | <u>Sub kegiatan:</u> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah | | 5 | 14.955.00 0 | 5 | 17.516.500 | 5 | 17.885.843 | 5 | 18.037.112 | | | | | |
| | | XXX 011 010 2 | • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen | | 1 | 9.155.000 | 1 | 3.915.000 | 1 | 3.997.549 | 1 | 4.031.359 | | | | | |
| | | XXX 011 010 3 | • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen RKA Perubahan | | 1 | 10.155.00 0 | 1 | 2.730.000 | 1 | 2.787.563 | 1 | 2.811.139 | | | | | |
| | | XX X0 11 01 04 | • Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen DPA | | 1 | 10.155.00 0 | 1 | 4.945.000 | 1 | 5.049.267 | 1 | 5.091.971 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|--|--|
| XXX 011 010 5 | • Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | • Jumlah dokumen DPA Perubahan | | 1 | 9.655.000 | 1 | 4.842.000 | 1 | 4.944.096 | 1 | 4.985.910 | | |
| XXX 011 010 6 | • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | • Jumlah dokumen capaian kinerja | | 4 | 26.908.000 | 4 | 11.132.500 | 4 | 11.367.233 | 4 | 11.463.372 | | |
| XXX 011 010 7 | • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | • Jumlah kegiatan evaluasi kinerja | | 2 | 23.650.000 | 2 | 58.492.000 | 2 | 59.725.328 | 2 | 60.230.454 | | |
| XX X0 11 02 | <u>Kegiatan:</u> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran biro Kesejahteraan Rakyat | | 95 | 18.288.394.000 | 96 | 19.014.091.050 | 97 | 19.321.229.982 | 97 | 19.586.972.988 | | |
| XX X0 11 02 01 | <u>Sub Kegiatan:</u> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan | | 12 | 14.826.327.000 | 12 | 15.404.821.000 | 12 | 15.635.892.000 | 12 | 15.870.431.000 | | |
| XX X0 11 02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 12 | 3.402.992.000 | 12 | 3.575.062.750 | 12 | 3.650.444.407 | 12 | 3.681.318.005 | | |
| XX X0 11 02 03 | Penyediaan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan verifikasi penatausahaan | | 12 | 8.900.000 | 12 | 6.546.800 | 12 | 6.648.842 | 12 | 6.741.379 | | |
| XX X0 11 02 04 | • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah laporan akuntansi Biro | | 12 | 10.050.000 | 12 | 4.945.000 | 12 | 5.049.267 | 12 | 5.091.971 | | |
| XX X0 11 05 05 | • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen keuangan SKPD | | 12 | 10.100.000 | 12 | 6.232.500 | 12 | 6.363.915 | 12 | 6.417.738 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|--|-----|-----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | XX X0 11 02 06 | pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen tanggapan atas LHP | | 2 | 9.350.000 | 2 | 5.975.000 | 2 | 6.100.985 | 2 | 6.152.584 | | |
| | XX X0 11 02 07 | koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD | • Jumlah laporan keuangan | | 12 | 15.625.00 0 | 12 | 6.232.500 | 12 | 6.363.915 | 12 | 6.417.738 | | |
| | XX X0 11 02 08 | penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | • Jumlah laporan prognosis | | 1 | 5.050.000 | 1 | 4.275.500 | 1 | 4.365.651 | 1 | 4.402.573 | | |
| | XX X0 11 05 | kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase pegawai yang memenuhi waktu kerja efektif 75.000 menit sesuai tugas pokok dan fungsi | | 100 | 379.712.500 | 100 | 393.793.000 | 100 | 402.096.286 | 100 | 405.497.013 | | |
| | XX X0 11 05 01 | peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | • jumlah laporan presensi pegawai | | 12 | 3.285.000 | 12 | 16.359.000 | 12 | 16.703.936 | 12 | 16.845.210 | | |
| | XX X0 11 05 03 | pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | • Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian | | 12 | 3.285.000 | 12 | 19.365.000 | 12 | 19.773.319 | 12 | 19.940.552 | | |
| | XX X0 11 05 04 | koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | • Jumlah laporan data pegawai | | 12 | 6.420.000 | 12 | 2.925.000 | 12 | 2.986.675 | 12 | 3.011.935 | | |
| | XX X0 11 05 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah laporan SKP | | 12 | 54.270.00 0 | 12 | 38.265.000 | 12 | 39.071.833 | 12 | 39.402.283 | | |
| | XX X0 11 05 09 | pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah kegiatan yang meningkatkan kompetensi Pegawai dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi | | 2 | 312.452.5 00 | 2 | 316.879.000 | 2 | 323.560.523 | 2 | 326.297.033 | | |
| | XX | kegiatan: Administrasi | Indeks kepuasan | | 85 | 805.886.748 | 87 | 1.651.971.133 | 88 | 1.686.803.618 | 90 | 1.701.069.743 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--|---|-----------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|--|
| | X0 11 06 | Umum Perangkat Daerah | pegawai terhadap pelayanan administrasi umum | | | | | | | | | | | |
| | XX X0 11 06 01 | Sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor | jumlah paket pengadaan | | 1 | 20.933.00 0 | 1 | 20.361.873 | 1 | 20.791.211 | 1 | 20.967.053 | | |
| | XX X0 11 06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah paket pengadaan | | 1 | 204.452.7 16 | 1 | 248.171.320 | 1 | 253.404.114 | 1 | 255.547.276 | | |
| | XX X0 11 06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | • jumlah paket pengadaan | | 1 | 257.097.0 00 | 1 | 677.993.995 | 1 | 692.289.775 | 1 | 698.144.809 | | |
| | XX X0 11 06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | • jumlah paket pengadaan | | 1 | 192.595.4 94 | 1 | 499.573.070 | 1 | 510.106.772 | 1 | 514.420.995 | | |
| | XX X0 11 06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | • jumlah paket pengadaan | | 1 | 21.600.00 0 | 1 | 41.566.680 | 1 | 42.443.130 | 1 | 42.802.093 | | |
| | XX X0 11 06 08 | Asilitasi Kunjungan Tamu | • jumlah paket pengadaan | | 1 | 31.080.00 0 | 1 | 121.580.000 | 1 | 124.143.564 | 1 | 125.193.507 | | |
| | XX X0 11 06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | • Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital | | 3 | 14.550.00 0 | 3 | 5.498.195 | 3 | 5.614.127 | 3 | 5.661.608 | | |
| | XX X0 11 06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | • Jumlah Sistem Informasi yang didukung | | 4 | 63.578.53 8 | 4 | 37.226.000 | 4 | 38.010.925 | 4 | 38.332.402 | | |
| | XX X0 11 07 | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | jumlah paket pengadaan aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | | 2 | - | 2 | 177.751.859 | 2 | 181.499.829 | 2 | 183.034.863 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | Daerah | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | XX X0 11 07 05 | Sub kegiatan: Pengadaan Mebel | • jumlah paket pengadaan | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | | | | | |
| | XX X0 11 07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | • Jumlah paket pengadaan | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | | | | | |
| | XX X0 11 07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | • Jumlah paket pengadaan | | 2 | - | 2 | 177.751.859 | 2 | 181.499.829 | 2 | 183.034.863 | | | | | |
| | XX X0 11 08 | Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah | • jumlah jasa yang menunjang pelayanan ketatausahaa n | | 4 | 861.000.000 | 4 | 1.411.881.851 | 4 | 1.453.778.468 | 4 | 1.460.023.040 | | | | | |
| | XX X0 11 08 01 | Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat | • Jumlah pengiriman dokumen | | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.189.769 | 1 | 9.267.491 | | | | | |
| | XX X0 11 08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | • Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 1 | 684.000.000 | 1 | 761.040.000 | 1 | 777.086.839 | 1 | 783.659.043 | | | | | |
| | XX X0 11 08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor | • Jumlah jasa | | 1 | 10.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.126.512 | 1 | 6.178.327 | | | | | |
| | XX X0 11 08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | • Jumlah jasa • Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional bantuan hibah dan bantuan sosial | | 1 92 | 158.000.000 | 1 95 | 641.841.851 | 1 96 | 655.375.348 | 1 96 | 660.918.179 | | | | | |
| | XX X0 11 09 | Sub kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah | • Jumlah jasa untuk pemeliharaan aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 4 | 289.064.581 | 4 | 934.362.000 | 4 | 954.063.404 | 4 | 962.132.386 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|--|---|-----------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|--|--|
| | XX X0 11 09 01 | • <u>Jub kegiatan:</u> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | • Jumlah jasa | | 1 | 96.200.00 0 | 1 | 63.174.000 | 1 | 64.506.050 | 1 | 65.051.609 | | | |
| | XX X0 11 09 02 | • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | • Jumlah jasa | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | | | |
| | XX X0 11 09 06 | • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | • Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | | 1 | 127.764.5 81 | 1 | 188.088.000 | 1 | 192.053.912 | 1 | 193.678.206 | | | |
| | XX X0 11 09 09 | • Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | • Jumlah Gedung yang dipelihara | | 1 | 65.100.00 0 | 1 | 65.100.000 | 1 | 66.472.660 | 1 | 67.034.852 | | | |
| | XX X0 11 09 10 | • Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | • Jumlah paket pemeliharaan | | - | - | 1 | 618.000.000 | 1 | 631.030.782 | 1 | 636.367.719 | | | |

CASCADING

BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

